

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pemerintahan yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Hal itulah yang mendorong terjadinya proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi. Otonomi merupakan pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yaitu hampir 70% terhadap anggaran pendapatan belanja negara bagi pemerintah kita, dalam kurun waktu selama ini pajak menjadi primadona bagi kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia.¹ Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi

¹ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 1.

daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terwujud.

Upaya untuk mencapai tujuan pembagunan tersebut merupakan suatu tantangan besar. Indonesia terbentuk berdasarkan keragaman karakteristik yaitu kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi sumber daya dan adat istiadat serta taraf hidup. Hal ini yang mengharuskan Indonesia untuk memiliki strategi pendekatan pembangunan di setiap daerah yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya.

Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai amanat prosentase Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan public

(*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*).²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam operasionalisasinya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD-nya.

APBD merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintahan daerah. Semakin besar belanja daerah maka akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

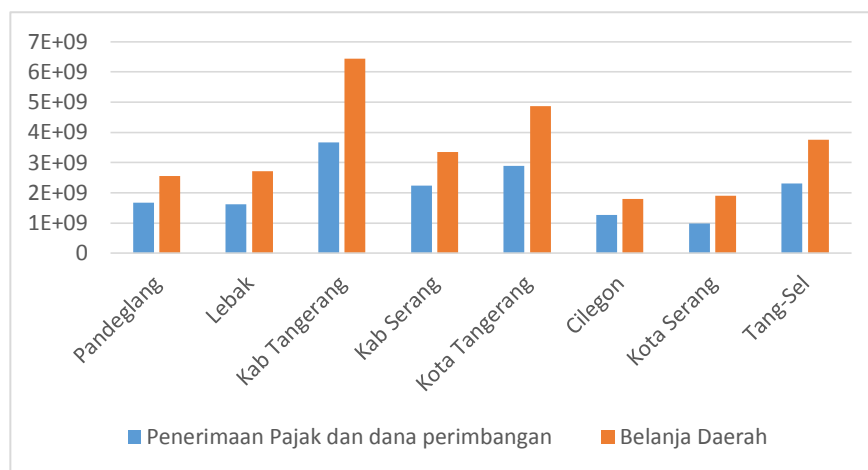
² Achmad Sani Alhusain, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2018), 9.

(provinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga telah menentukan struktur belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yaitu, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Berikut ini

penulis gambaran data penerimaan pajak daerah, dana perimbangan dan pengeluaran belanja daerah Kab/Kota Provinsi Banten tahun 2018.



Sumber: *Data BPS (diolah)*

**Data Perbandingan Antara
Penerimaan dan Belanja Daerah Tahun 2018
Gambar 1.1**

Berdasarkan gambaran data penerimaan pajak daerah, dana perimbangan dan pengeluaran untuk belanja daerah Kab/Kota di Provinsi Banten tahun 2018 dapat dilihat bahwa, pengeluaran untuk belanja daerah lebih tinggi dari sumber penerimaan pajak daerah dan dana perimbangan, belanja daerah tertinggi terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, dengan pengeluaran belanja daerah sebesar Rp. 6.194.735.180, di mana pembelanjan daerah yang tercatat dalam realisasi APBD Kabupaten Tangerang

terjadi pada belanja langsung sebesar Rp. 3.680.162.135, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung pemerintah Kabupaten Tangerang menghabiskan dana sebesar Rp. 2.198.672.942, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga. sementara pengeluaran belanja daerah yang paling kecil terjadi pada Kota Cilegon, pemerintahan Kota Cilegon pada tahun 2018 hanya mengeluarkan biaya untuk belanja daerah sebesar Rp. 1.788.989.198, di mana pembelanjan daerah yang tercatat dalam realisasi APBD Kota Cilegon Rp. 942.805.321, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung pemerintah Kota Cilegon Rp. 647.281.764, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Berdasarkan pemaparan isi latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti atau menganalisa tentang kinerja keuangan Pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2014-2018”, adapun alasan peneliti untuk meneliti permasalahan ini karena, lokasi penelitian terjangkau, data penelitian mudah untuk didapat dan terdapat bermacam-macam dan ragam Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan pajak daerah yang relatif kecil dibandingkan pendapatan transfer.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
4. Masih tingginya jumlah belanja rutin dari pada belanja modal daerah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan sebagai berikut:

1. Data penelitian ini menggunakan data realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Banten Periode 2014-2018.
2. Data APBD yang diolah dalam penelitian ini merupakan data realisasi penerimaan pajak daerah, dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana lokasi umum dan khusus, dan belanja daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja daerah Kab/kota di Provinsi Banten?
2. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah Kab/kota di Provinsi Banten?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan pajak daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kab/kota di Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja daerah Kab/kota di Provinsi Banten.
2. Untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah Kab/kota di Provinsi Banten.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan pajak daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kab/kota di Provinsi Banten.

F. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, baik manfaat akademik maupun manfaat praktis. Manfaat yang diperoleh adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, ilmu dan acuan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya dalam mengenai belanja daerah

berdasarkan hasil perhitungan pendapatan pajak daerah dan dana perimbangan.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan terkait dengan hal bagaimana cara menghitung dan menganalisis laporan keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah masing-masing wilayah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten dan masyarakat dapat membantu pemerintah dengan ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB Kesatu Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB Kedua Kajian Pustaka. Pada bab ini membahas Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian.

BAB Ketiga Metodologi Penelitian. Pada bab ini meliputi Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB Keempat Pembahasan Dan Hasil Penelitian. Pada bab ini meliputi Gambaran Umum Objek Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB Kelima Penutup. Pada bab ini meliputi Kesimpulan dan Saran.